**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kab. Gayo Lues TA 2014**

**Banda Aceh, Jumat ( 29 Mei 2015 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Gayo Lues TahunAnggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Kelimabelas diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah ) Kab. Gayo Lues dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasilpemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini atas LKPD Kab. Gayo Lues untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau*"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern:
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya optimal;
3. Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Gayo Lues belum sepenuhnya optimal;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berbeda untuk menetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
5. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah TA 2014 belum dibayarkan;
6. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum memadai;
7. Persiapan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menuju penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum sepenuhnya memadai.
8. Pokok-poko ktemuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
9. Tambahan Uang Persediaan (TUP) Terlambat Dipertanggungjawabkan;
10. Pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan atas Paket Kegiatan yang Putus Kontrak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues Belum Seluruhnya Dilaksanakan;
11. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Prestasi Pekerjaan;
12. Realisasi Belanja Modal Dana OTSUS Atas Sembilan Paket Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Sesuai Prestasi Pekerjaan;
13. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Belum Sepenuhnya Menindaklanjuti Temuan Yang Menjadi Kualifikasi Dalam Laporan Keuangan TA 2013.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Gayo Lues segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***InformasiLebihLanjut :***

***SubBagianHumasdanTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*